

## **BAB IV**

### **HAMBATAN KERJASAMA SISTER PROVINCE NTB- ZHEJIANG**

Bab ini menguraikan tentang beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun kerjasama *Sister Province* dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT.

#### **A. Kerjasama Sister Province NTB Dengan Zhejiang 2014-2015**

Dalam setiap kerjasama yang di lakukan antar pemerintah negara maupun pemerintah provinsi, kabupaten dan kota jelas memiliki berbagai faktor hambatan yang menjadi bentuk belum optimalnya suatu pelaksanaan kerjasama antar daerah provinsi, kabupaten/kota walaupun otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai sektor dengan prinsip desentralisasi berbagai kewenangan. Daerah dapat melaksanakan berbagai keputusan yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya.

Keberhasilan otonomi daerah tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daerah, dalam hal ini daerah diharapkan untuk memiliki budaya dan sikap *enterpreunership* dalam rangka mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan daerah. Hubungan kerjasama antara provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Zhejiang merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji jika dilihat segi penghidupan masyarakat yang memiliki banyak persamaan seperti persamaan mata pencaharian seperti nelayan, dan petani. Hal tersebut

sesuai dengan peraturan pemerintah tentang syarat melakukan kerjasama *Sister province*.

Sesuai dengan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Kerjasama Internasional dalam bentuk *Sister Province* yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT tersebut terbagi atas enam bagian yaitu : Infrastruktur, Pertanian, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata, Peningkatan Kapasitas bangunan. Kerjasama dalam bentuk *Sister Province* yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah Provinsi Zhejiang akan dibahas dan dianalisis sesuai dengan tujuan program, kesepakatan dalam program dan tingkat kesuksesan program.<sup>1</sup> Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas sesuai dengan data yang diperoleh baik dari media Internet, wawancara, observasi lapangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan informan, Hj. Nurlaela Kasubag Kerjasama Lemabaga Internasional pemerintah Provinsi NTB, bahwasanya kerjasama ini di bentuk untuk kepentingan bersama serta memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB pada khususnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya. Dalam wawancara tersebut juga di jelaskan bahwa awal mula kerjasama ini dibentuk atas dasar ketertarikan pemerintah Tiongkok (Provinsi Zhejiang) untuk memperluas lahan investasi serta membantu peningkatan serta kemajuan di provinsi NTB. Hal ini berawal dari undangan Konjen RRT di Denpasar yang kemudian Berlanjut pada kunjungan kerja untuk memenuhi undangan tersebut ke Tiongkok tepatnya di Zhejiang hingga pada akhirnya terbentuknya kerjasama Internasional antara provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang.

Gambar. 7

Konjen RRT di Denpasar (Mr. Hu Yinquan, Gubernur NTB (Dr. TGH. M. Zainul Majdi), dan Wakil Gubernur Provinsi Zhejiang (Mr. Yu Xi Hua)



Wetland Xixi. Konjen RRT Denpasar (Mr. Hu Yinquan), Gubernur NTB (Dr. TGH M. Zainul Majdi), Wakil Gubernur Prov Zhejiang, dan Pejabat Pemprov Zhejiang (Mr. Yu Xi Hua) di Wetland Xixi (10/6).

Tahap awal kerjasama *Sister Province* ini, semua bagian program yang di tawarkan oleh pemerintah Provinsi Zhejiang dalam rangka Kerjasama ini sangat aktif di laksanakan dan direspon karena semua pihak termasuk dinas SKPD memberikan perhatian penuh untuk program-program yang terdapat dalam bagian tersebut. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, banyak program yang tidak terlaksana dengan baik walaupun pada dasarnya pemerintah hanya sebagai penghubung dalam kegiatan ini dan yang diharapkan untuk lebih aktif adalah dinas-dinas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yang harusnya menindaklanjuti kesempatan kerjasama di sektor dinas masing-masing dan kemudian di teruskan pada masyarakat. Secara lebih jelas program-program yang sudah berjalan sesuai hasil wawancara, sebagai berikut:

### 1. Infrastruktur

Kerjasama pada sektor ini sendiri kegiatan kedua provinsi masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan belum ada kegiatan khusus dibidang kerjasama infrastruktur walaupun banyak kebutuhan pengebangan infrastruktur tetapi masih belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait infrastruktur yang akan di kembangkan dan di kerjasamakan. Padahal di provinsi NTB sendiri memiliki banyak sekali lahan atau sektor investasi pada bidang infrastruktur ini terutama masalah jalan raya dan pembangunan.

### 2. Pertanian

Pada bidang pertanian, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Zhejiang adalah lebih pada usaha untuk saling melengkapi berbagai kebutuhan dalam sektor pertanian baik itu seperti pupuk, bibit-bibit pertanian serta saling tukar menukar informasi terkait pengelolaan pertanian dan pengembangan agar supaya hasil dari pertanian bisa di nikmati oleh masyarakat itu sendiri.

### 3. Pertambangan

Dalam sektor pertambangan sendiri juga tidak jauh beda dengan sektor bidang infrastruktur yang masih belum terlaksana secara realisasi, dalam bidang pertambangan sendiri memang banyak wacana yang ingin di kembangkan namun hal ini masih

belum terealisasi baik dari pihak provinsi NTB dan pemerintah Provinsi Zhejiang.

#### 4. Kelautan dan Perikanan

Bidang Kelautan dan Perikanan, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Zhejiang masih belum maksimal untuk sarana pengembangan ekonomi para nelayan dalam sumber daya kelautan dan pemanfaatannya sumber daya kelautan yang belum terealisasi dengan baik. Harapan provinsi NTB sendiri dengan terjalinnya kerjasama di bidang ini dapat sama-sama menjaga pelestarian perikanan dan pengembangan secara berkelanjutan agar supaya masyarakat khususnya nelayan dapat merasakan manfaat dari kerjasama antar tersebut.

#### 5. Kebudayaan dan Pariwisata

Kerjasama kebudayaan dan pariwisata ini meliputi partisipasi bersama dalam acara budaya dan festival. Dalam kerjasam budaya, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi Zhejiang sudah sangat berhasil menurut kedua pemerintah, dikarenakan suksesnya provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipercaya sebagai lokasi perayaan “Budaya” Imlek 2016. Acara ini merupakan gagasan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui kedutaan Besar di Indonesia khususnya Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT sebagai tahap awal kerjasama antar kedua pemerintah provinsi.

Sedangkan di sektor pariwisata sendiri sudah banyak investasi dan kerjasama pengembangan sektor wisata yang dijalankan dari sebelum kerjasama *Sister Province* ini terlaksana oleh berbagai pengusaha dan investor dari Tiongkok dari jajaran pihak Swasta dan relatif berjalan dan berkembang sampai saat ini. Terlebih kemudian dengan kerjasama antar kedua provinsi ini berjalan dengan baik diharapkan kerjasama dalam bidang pariwisata terus berkembang secara berkelanjutan.

#### 6. Peningkatan Kapasitas bangunan

Dalam segi peningkatan kapasitas bangunan bidang kerjasama *Sister Province* ini sendiri meliputi level seperti pelatihan dan pertukaran pejabat provinsi. Hal yang dilaksanakan antara Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang pada program delegasi pejabat pemerintah dari beberapa SKPD untuk mengikuti program kegiatan studi banding atau kunjungan untuk mengikuti berbagai kegiatan. Program ini sangat memberi manfaat bagi aparat pejabat pemerintah NTB untuk mendapatkan pengalaman dan pengembangan wawasan dan membina persahabatan antar penjabat pemerintah setingkat dan melakukan tukar menukar informasi untuk menambah pengembangan wawasan dan pengalaman.

## **B. Hambatan Kerjasama *Sister Province***

Berdasarkan data dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan program kerjasama *Sister Province* tidak terlaksana dengan baik.

1. Faktor Hambatan Eksternal
  - a. Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC)

Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC) merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan secara lebih mendalam dimana hal ini dapat berdampak pada kerjasama kedua negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara khusus berbicara soal narkoba dan terorisme dengan pemerintah Tiongkok. Bisnis narkoba di RRT mencapai 82 miliar dollar AS, pasokan narkoba Indonesia sebagian besar berasal dari RRT.

Diluar agenda G-20 yang condong seremonial, persoalan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC) menjadi sangat krusial dalam hubungan RI-RRT, termasuk dalam persoalan perikanan yang diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan masuk sebagai Transnational Organize Fishing Crime (TOFC) terkait pencurian yang lazim dikenal sebagai *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU). Jangkauan TOC semakin lebar pada tingkat global akibat konvergensi teknologi dan liberalisasi perdagangan serta keimigrasian yang menjadi masalah serta tidak bisa dibiarkan melihat paling tidak ada beberapa faktor yang dominan dalam masalah ini, yaitu, lemahnya penegakan hukum; longgarnya

aturan hukum; mafia perikanan; imbas perkembangan global, dimana inilah yang terkadang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing*.

## 2. Faktor Hambatan Internal

### a. Faktor Anggaran

Masalah anggaran juga masih menjadi faktor hambatan internal pemerintah daerah. Walaupun dalam hal ini bisa dibidang masalah yang sangat klasik namun dana anggaran sangatlah penting. Dalam hal ini masih belum maksimalnya dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program kerjasama luar negeri. Perlu diketahui bahwasanya sering kali dana yang telah dicanangkan harus mengalami perubahan-perubahan akibat dari kebijakan yang mendadak dan bahkan tidak terealisasinya dana tersebut.

### a. Faktor Sumber Daya Manusia

Setiap daerah di Indonesia pada umumnya memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut yang dibutuhkan adalah ketersediaan sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional untuk menangani permasalahan kerjasama, dimana program kerjasama merupakan proses komunikasi dengan pemerintahan di luar negeri oleh sebab itu perlu



penanganan yang lebih cepat serta tepat waktu dalam arti komunikasi timbal balik harus secepat dan setepat mungkin. Maka jika sumber daya manusia kurang, maka negara tersebut akan kesulitan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang bisa bekerja secara profesional yang menjadi faktor penghambat internal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### b. Krisis Energi Listrik

Krisis Energi Listrik adalah kurangnya pasokan listrik yang diminta masyarakat yang dapat dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Negara. Dimana dalam hal ini yang terjadi adalah pemadaman listrik termasuk kawasan pariwisata di daerah Senggigi Lombok, NTB dimana hal tersebut juga tidak luput dari permasalahan yang membuat terhambatnya investasi baik dari mancanegara dan lokal untuk berinvestasi, dimana faktor yang paling mendasar dimiliki negara industri adalah mampu memenuhi kebutuhan permintaan listrik masyarakatnya namun rupanya hal tersebut luput dari pemerintah Indonesia. Walaupun hubungan kerjasama *Sister Province* diharapkan mampu menyerap investor asing untuk berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. Namun dengan adanya krisis listrik tersebut menyebabkan kurangnya investor yang berinvestasi di bidang industri.

### C. Pembahasan

Sebagaimana yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya bahwa otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan prinsip desentralisasi berbagai kewenangan terlebih sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014, yang dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah pusat melimpahkan kewajiban dan kewenangan secara politik dan ekonomi kepada daerah otonom, yang pada undang-undang sebelumnya di atur oleh undang-undang 32 tahun 2004. Dengan demikian daerah dapat melaksanakan berbagai keputusan yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah masing-masing daerahnya. Dalam hal ini keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Daerah otonom dituntut dan diharapkan memiliki sikap *enterpreunership* dalam mengelola sumber daya setra mampu melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerah.

Dalam Hubungan dan kerjasama antara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Provinsi Zhejiang Tiongkok, merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya, Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang memiliki banyak persamaan. Dimana dalam hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah tentang syarat melakukan hubungan kerjasama *Sister Province* dan tidak di pungkiri dibalik banyak persamaan juga jelas memiliki banyak perbedaan dalam hal tata kelola masing-masing pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses pembuatan keputusan terdapat tiga model yang telah dikembangkan oleh Graham T. Allison. Dari ketiga model tersebut, terdapat salah satu yang paling mendekati dengan studi pembuatan keputusan yang di ambil oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun kerjasama *Sister Province* dengan Provinsi Zhejiang RRT yang terlihat terjalin dengan baik yang merupakan hasil elaborasi permainan politik. Model yang paling mendekati adalah model Politik Birokratik, dimana segala keputusan yang akan dibuat oleh pejabat daerah yang berwenang atas kerjasama yang di bangun tersebut harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dan diatur oleh Undang-undang.

Gambar 8.

Peta kerjasama *Sister Province* Pemprov NTB - Pemprov Zhejiang RRT



Paradiplomasi sendiri relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian ilmu hubungan internasional. Paradiplomasi yang mengacu pada perilaku serta kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan entitas '*sub-state*' dalam rangka kepentingan yang spesifik dan dalam hal ini sesuai dengan era dan fenomena yang berkembang pesat seiring dengan terbukanya akses dan meningkatnya peran serta pengaruh aktor non-negara di arena internasional. Daerah memiliki kesempatan mempromosikan perdagangan investasi, dan berbagai potensi kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di luar batas yurisdiksi negara.

Terbentuknya kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Provinsi Zhejiang RRT yang telah berlansung sejak *Memorandum of Understanding* ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada 10 Juni 2015. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia telah diberlakukannya otonomi daerah yang mana memberikan hak dan kewenangan kepada daerah otonom untuk membangun atau menjalin kerjasama dalam bentuk *Sister Province* (provinsi), dan *Sister City* (kabupaten/kota). Dengan demikian, model politik birokrasi jelas menjadi jawaban atas keputusan yang di ambil oleh pemerintah provinsi NTB dalam pengambilan keputusan tersebut yang mana asusminya bahwa pemerintah provinsi NTB sebagai aktor birokrasi pemerintah yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan berdasarkan tindakan dan tujuan sebagai suatu proses peningkatan serta pengembangan daerah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi NTB di analogikan sebagai perilaku organisasi yang terkoordinasi, dalam keputusan yang di ambil merupakan pilihan-pilihan yang di pertimbangkan oleh pemerintah.

Keputusan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang menekankan pada peranan atau aturan (*roles*) yang dilakukan birokrat dalam proses kerjasama luar negeri sebagaimana birokrasi politik yang merupakan model yang memusatkan perhatian terutama individu-individu yang ada dalam pemerintahannya dan interaksi diantara mereka, sebagaimana penentuan tindakan suatu pemerintah dalam politik internasional serta perhitungan terhadap untung rugi atas tindakan yang di ambil.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemerintah daerah), atau yang disebut '*Paradiplomacy*', merupakan kebutuhan bagi daerah sebagai komponen pendukung percepatan laju pembangunan daerah melalui investasi dan peningkatan perdagangan internasional. Konstruksi hubungan luar negeri yang bercirikan hubungan transnasional dewasa ini memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara, maupun lokal, institusional ataupun individual. Negara Indonesia yang juga memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional melalui berbagai jalur, baik itu melalui jalur politik atau dalam bentuk diplomasi serta kerjasama. Paradiplomasi yaitu meliputi kerjasama antar provinsi, kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara *transnasional* yang melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah) yang merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam berdiplomasi melalui paradiplomasi, juga dapat dijadikan sebagai wadah mengejar kepentingan nasional (*National Interest*) dan mampu memberi citra positif atas keberagaman serta keramah-tamahan yang dimiliki negara Indonesia pada umumnya dan provinsi NTB pada khususnya dengan provinsi Zhejiang.

Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun pemerintah lokal, institusional ataupun individu. Spirit '*positive sum*' dan '*pure colaboration*', yang di ajukan sebagai '*transnasional values*', akan lebih memberikan penghargaan bagi terciptanya dunia yang lebih beradab.

Interaksi transnasional menandai perubahan sebuah sistem dan era kebangkitan masyarakat internasional, dimana interaksi ini memunculkan aktor-aktor '*sub state*' dan '*societis*' dalam menjalin aktivitas paradiplomasi. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama 'kedaulatan' negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan '*share*' kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya. Di sinilah, pada praktek paradiplomasi di negara-negara maju, fakta tentang tarik ulur pembagian kedaulatan itu terjadi.

Dalam kerangka ASEAN sangat penting untuk segera upayakan terbentuknya sebuah organisasi jaringan pemerintah daerah atau pemerrintah regional/provinsi yang akan dapat berfungsi sebagai jembatan yang akan mendekatkan pengambilan keputusan pada tingkat negara dengan masyarakat di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Belajar dari perkembangan penyatuan Uni Eropa, maka penyatuan pasar kebijakan dan proyek-prouek antar negara itu jauh lebih efektif jika negaralah yang 'mengikuti' kemauan gerak masyarakat di kawasan itu, dimana aktor-aktor '*sub states*' dan '*privat sectors*', '*MNCs*', '*societis*', memainkan peran yang sangat penting dan bukan sebaliknya, negara yang 'memformat' kerjasama dalam suatu kawasan, lalu rakyat

mengikutinya. Jika negara-negara terlalu memaksakan inisiasi penyatuan sebuah kawasan untuk menjadi *'free trade area'* atau semacamnya, namun masyarakat sasaran atau aktor-aktor lokal belum siap untuk terlibat karena memang kurang di libatkan, atau tidak sama sekali, maka yang terjadi adalah negara-negara itu hanyalah akan memproduksi segala macam aturan yang membebaskan batasan-batasan perdagangan lintas negara, termasuk pembebasan pajak dan kuota, yang hanya menguntungkan para pemain ekonomi multinasional saja, dan bukan rakyatnya sendiri. Pola kebijakan semacam ini dapat dikatakan sebagai *'penyatuan pasar'* antar negara, namun dengan memisahkan masyarakatnya. Sangat berbahaya kalau sampai terjadi.

Dalam konteks Indonesia, hubungan transnasional dan paradiplomasi masih merupakan praktek pemerintahan yang baru sehingga memerlukan perangkat yuridis yang jelas di tengah pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah saat ini. Pemerintah pusat melalui kementerian luar negeri dan kementerian dalam negeri perlu mengarahkan orientasi kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sebab dalam praktek selama ini, pemerintah daerah telah leluasa menentukan partner kerja sama dengan pemerintah daerah negara asing sehingga siring nilai kemanfaatannya kurang jelas.

Sebagaimana yang ditulis dalam review pustaka di bab I yang menjadi bahan telaah pustaka, di dalam bab ini akan lebih mempertajam tentang adanya perbedaan dari masing-masing penulis tersebut. Dalam hal pertimbangan dan pengamatan yang berkaitan dengan Kerjasama *Sister province* Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT, yang mana kerjasama antar daerah

dalam suatu negara antara satu daerah dengan pihak luar maupun pihak asing. Kerjasama yang terjadi ini dapat terjalin antara pemerintah daerah dengan negara lain. Artinya bahwa hubungan kerjasama tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini bentuk kerjasama antar daerah menurut Permendagri No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu salah satunya seperti kerjasama *Sister Province*, *Sister City* maupun dalam hal investasi Asing yaitu penyertaan modal, baik itu kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan serta kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Adapun literatur review yang menjadi bahan pertimbangan dan pengamatan, yaitu:

Stivani Ismawira Sinambela (2012) Tesis Magister Ilmu Hubungan Internasional dengan judul : "*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional*" (*Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang*). menjelaskan bahwa, hal wajib dalam kerjasama *sister city* antara Kota Medan dan Penang untuk selalu melihat Pemerintah Pusat Indonesia sebagai Pihak yang tidak boleh di lupakan dikarenakan Indonesia menerapkan sistem *One door Policy* yang mana sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dalam realitas tersebut jelas merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan



potensi daerah yang dimilikinya.<sup>2</sup> Secara aspek kerjasama Kota Medan dan Penang bukan merupakan kerjasama profit, melainkan non profit, artinya kerjasama kedua belah pihak tetap bertahan tanpa menyentuh ranah ekonomi dan investasi, melainkan karena adanya persamaan kebudayaan dan etnis masyarakat yang dimiliki kedua Kota yang dimana menjadikan kedua Kota lebih mengarah pada kerjasama *Twin City* yang mana kerjasama hanya untuk menguatkan persahabatan kedua Kota

Tetapi tesis Stivani berbeda dengan yang penulis teliti, membahas tentang Proses Kerjasama *Sister Province* antara NTB dengan Zhejiang. Penulis menaekankan dalam penelitian ini pada tahun 2014-2015, dari awal proses serta rancangan keputusan sampai terjalannya kerjasama. Sedangkan penulis lebih memusatkan pada faktor pertimbangan Pemprov NTB membangun kerjasama dengan RRT. kerjasama ini juga bersifat profit yang menyentuh arah ekonomi, budaya, dan, politik

Tonny Dian Effendy (2012) jurnal yang publikasikan oleh Universitas Pesantren Darul 'Ulum (UNIPDU) dengan judul "*Enhancing Local Government International Competitive Advantage Through Entrepreneurial Government and Paradiplomacy Activities*". Menjelaskan bahwa otonomi daerah membawa peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah ke ranah internasional melalui aktivitas Paradiplomasi. Namun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam

---

<sup>2</sup> Stivani Iswara Sinambela, 2014," *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang.*" Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menggunakan potensi daerah menjadi daya saing internasional. Maka diperlukan sebuah konsep yang di sebut dengan *entrepreneur government* yang mencoba mengubah paradigma dari *monolistic bureaucratic govenrment* menjadi *entrepreneurial competitive government* yang mengharuskan pemerintah daerah mengubah dirinya menjadi pemerintah daerah yang berorientasi kepada pelanggan (*customer-driven government*) dan bertanggung jawab (*accountable government*) kepada seluruh *stakeholder*-nya secara berimbang. Lebih lanjut Tonny menjelaskan bahwa melalui *entrepreneur government* maka akan terjadi sinergi segitiga antara pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi dimana pemda akan mampu memetakan, mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya yang berdaya saing dalam prinsip kewirausahaan yang bertannggung jawab.<sup>3</sup>

Perbedaan, bahwa melalui *entrepreneur government* yang mana dapat merubah paradigma dari kesatuan birokrasi pemerintah menjadi kewirausahaan kompetitif pemerintah, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi dalam aktivitas paradiplomasi. Penulis fokus pada bagaimana memahami dan mengetahui dinamika kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang sebagai bentuk kerjasama paradiplomasi.

Christy Damayanti (2012) jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dengan judul “*Transformasi, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*”. Dalam jurnal ini menyebutkan

---

<sup>3</sup> Tonny Dian Effendy, 2012, *Enhacing Local Government International Competitive Advantage Through Enterpreneurial Government and Paradiplomacy Activities*. UNIPDU. Vol 1, No. 2.

besarnya peranan para aparatur Daerah yang mengelola secara langsung kebijakan daerahnya dalam ranah dunia internasional, bahwasanya paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri mutlak diperlukan seiring dengan diterimanya paham diplomasi multijalur (*multitrack diplomacy*) sebagai tuntunan riil kehidupan hubungan internasional dalam kemajuan globalisasi dan demokrasi.<sup>4</sup>

Perbedaan, membahas tentang potensi paradiplomasi yang merupakan faktor pendorong dalam kinerja diplomasi Indonesia. Lebih memfokuskan pada kesiapan Negara Indonesia menuju komunitas ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan ASEAN melalui transformasi paradiplomasi, penerapan diplomasi multijalur yang juga dapat dianggap berpengaruh penting dalam dunia internasional melalui peran serta oleh pemerintah daerah. Penulis fokus membahas tentang praktik kerjasama dalam bentuk provinsi kembar ‘*Sister Province*’ yang dibangun oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang yang merupakan bentuk dari praktik paradiplomasi itu sendiri, dan aspek apa yang mendorong pemerintah provinsi membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi Zhejiang.

Sidik Jatmika, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, bahwa salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan agar daerah diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan para pengambil keputusan

---

<sup>4</sup> Christy Damayanti, 2012, *Transformasi Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*. UNISRI. Vol XIV, No. 22.

dan merupakan salah satu jawaban dari tekanan yang berasal dari kejadian-kejadian eksternal dan desakan internal. Dimana kemudian otonomi daerah ini membawa peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan lingkungan eksternal yakni dunia internasional untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan kawasan.<sup>5</sup>

Cakupan lebih luas karena buku ini membahas tentang *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan internasional*, memandang otonomi dari kacamata hubungan internasional serta terdapat pembahasan tentang perbedaan antara politik luar negeri dengan Hubungan Internasional, fokus pada persoalan otonomi daerah serta hubungan luar negeri dan investasi asing. Menekankan pada bagaimana pola hubungan internasional yang bersifat transnasional, hal mana pemerintah daerah merupakan aktor pelaku baru dalam hubungan internasional. Tetapi penulis lebih fokus pada proses pengambilan keputusan yang di ambil serta persoalan bagaimana otonomi itu berjalan atau dijalankan dengan melakukan penelitian serta analisa terkait hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah NTB. Dalam hal ini penulis banyak melakukan kutipan dalam buku tersebut karena relevan dengan apa yang penulis bahas dalam tesis ini.

Takdir Ali Mukti, buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, bahwa Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional

---

<sup>5</sup> Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama ‘kedaulatan’ suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan ‘*share*’ kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.<sup>6</sup> Fokus pada kerjasama transnasional yang dilakukan oleh pemerintah lokal Korea. Perbedaannya penulis lebih menekankan pada persoalan dan pertimbangan serta faktor pendorong yang membuat NTB membangun praktik kerjasama *sister province*.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dan mampu bersaing di dunia internasional. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam membangun daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi membawa nama pemerintah nasional dan untuk itu Negara tidak akan kehilangan nasionalnya.

Sebagai tambahan kajian pustaka dalam tesis ini, sebagai acuan dan bahan referensi, penulis juga menelaah tentang “Kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia”, yaitu kerjasama yang di laksanakan pemerintah Indonesia dengan Australia yang melibatkan

---

<sup>6</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press. Yogyakarta.

pemerintah provinsi NTB.<sup>7</sup> Kerjasama ini bertujuan untuk mempromosikan penghasilan pedesaan melalui dukungan untuk pasar dalam pertanian (AIP-PRISMA), adapun kerjasama ini di mulai pada 28 Oktober 2013 dan berlaku hingga 2017. Tujuan kesepakatan bersama para pihak bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mendukung pengembangan kebutuhan Indonesia. Secara spesifik dari kerjasama ini adalah peningkatan 30% laba bersih dan 300.000 laki-laki dan perempuan petani kecil pada Juni 2017. Dalam kerjasama ini melibatkan Dinas Pertanian Provinsi NTB.

Perbedaannya, kerjasama tersebut berfokus pada kesepakatan bersama untuk peningkatan kebutuhan Indonesia dan untuk meningkatkan laba bersih, lebih lanjut dalam kerjasama ini hanya berfokus pada hal tersebut dan menitikberatkan pada dinas pertanian Provinsi NTB, sedangkan penulis, jangkauan yang di teliti meliputi beberapa elemen yang di kerjasamakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT.

Paradiplomasi merupakan alat penting dalam perkembangan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan pihak asing untuk mempererat hubungan kerjasama. Hubungan antar pemerintah daerah dengan pihak asing saling memberi keuntungan satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah fasilitas untuk membawa pemerintah daerah dalam suatu negara demi mencapai kepentingan-kepentingan nasional di dunia internasional.

---

<sup>7</sup>Biro Kerjasama dan SDA SETDA NTB, dalam <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/02/C.8.1.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

Studi praktik Paradiplomasi ini telah melengkapi pendapat Stefan Wolf bahwa Paradiplomacy ini mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas ‘*Sub-state*’, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Kemudian dari hal tersebut, maka pihak Pemda luar negeri yang membuka peluang kerjasama dan juga memiliki persamaan baik dalam bidang pertanian, kelautan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di negara Indonesia untuk bisa saling merangkul dan memajukan negara dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing di arena internasional atau hubungan luar negeri.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, kerjasama *Sister Province* yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang adalah merupakan bentuk kerjasama profit yang dimana keuntungan dalam kerjasama ini meliputi bentuk peningkatan investasi dari pemerintah provinsi Zhejiang baik dalam sektor pariwisata, pertanian, kelautan, infrastruktur dan perikanan serta pertukaran budaya. Disisi lain juga merupakan bentuk kerjasama non-profit yang artinya bisa dikatakan sebagai bentuk persahabatan antar kedua provinsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal pertanian juga memiliki persamaan dalam bidang pengelolaan. Penghidupan masyarakat di provinsi NTB dan Zhejiang tidak jauh berbeda yaitu sama-sama bermata pencaharian di bidang perkebunan, pertanian serta nelayan. Sehingga kedua provinsi yang berejasama tersebut memiliki ikatan dalam individu masyarakat